

ABSTRACT

Indah Wulandari (1158010127) "Implementation of Regional Regulation Policy Number 11 of 2015 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in the East Bekasi Region "

The research aimed to describe the arrangement and empowerment of street vendors in the East Bekasi Region based on Regional Regulation No. 11 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL), then then described the Policy Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL) in the East Bekasi Area that has not been implemented as expected, , and know the factors faced by obstacles and efforts of the Regional Government in overcoming the constraints of structuring and empowering street vendors (PKL).

This research is a qualitative descriptive study. Research subjects were determined by purposive method. . as the research subject was Drs. Ade Rahmat M. Si., As the Public Order and Peace of the Satpol PP City of Bekasi. Ayatullah S. Ag as the promotional facilities section and business partnership of the Cooperation and UMKM Office. Irob Ruhyadi. S.Pd, MM as the business arrangement section of the Cooperation and UMKM Office. Wardiyati, S.Pd as Diskop and UMKM Financial Subdivision. Bambang Chairman of the East Bekasi Circle of Friends. Data obtained by interviews, documentation and observation. To check the validity of the data, the Tringulation technique is used. Data analysis techniques used inductive techniques.

The results of this study indicate that (1) there are still many street vendors who sell in the red zone or are out of place and not neatly arranged. Arrangements and enforcement need to be carried out in accordance with existing regional regulations. (2) implementation of this Perda policy cannot be implemented as expected because it is still constrained by the provision of replacement land for street vendors if it is regulated by police unit (3) constraints faced by the Regional Government in structuring and empowering namely street vendors selling in the red zone or selling out of place and making it looks like it's not organized. There are still many street vendors who do not have business licenses. There is no land for a special place or food court for street vendors. And there are still many street vendors who do not understand about Perda Number 11 of 2015. The efforts that must be made by the Regional Government are in overcoming the constraints of structuring and empowering the lia sword, which can provide a place of business or food court that has been determined by the Regional Government.

Keyword : *Implementation, Structuring and Empowerment, Street vendors.*

ABSTRAK

Indah Wulandari (115801012) ”Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bekasi Timur”

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Bekasi Timur yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), lalu kemudian mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Bekasi Timur yang belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dan mengetahui faktor kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi faktor kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL)

Penelitian ini merupakan Penelitian *deskriptif kualitatif*. Subjek penelitian ditentukan dengan cara *purposive*. Subjek penelitiannya adalah Drs. Ade Rahmat M. Si., selaku kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi. Ayatullah S. Ag selaku seksi fasilitas promosi dan kemitraan usaha Dinas Koprasi dan UMKM. Irob ruhyadi. S.Pd, MM selaku seksi Penataan usaha Dinas Koprasi dan UMKM. Wardiyati, S.Pd selaku Subbag Keuangan Diskop dan UMKM. Bambang selaku Ketua Paguyuban Bekasi Timur. Data yang diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik Triangulasi. Teknik analisis data digunakan teknik induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah atau tidak pada tempatnya dan tidak tertata dengan rapi perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan yang sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada (2) implementasi kebijakan Perda ini belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala terhadap penyediaan lahan pengganti untuk pedagang kaki lima jika mendapat penertiban oleh Satpol PP (3) kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan yaitu para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah atau berjualan tidak pada tempatnya dan membuat menjadi terlihat seperti tidak tertata. Masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha. Tidak adanya lahan untuk tempat khusus atau food court bagi PKL. Dan masih banyak PKL yang kurang faham tentang Perda Nomor 11 tahun 2015. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah yaitu dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu dapat memberikan tempat usaha atau food court yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Implementasi, penataan dan pemberdayaan, PKL



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG